BAB I
GAMBARAN UMUM

1.1. Geografi

Kabupaten Tapanuli Selatan yang letak geografisnya berada diantara 0º 58’ 35” - 2º 07 33 LU dan 98º 34’ 16” BT secara administrative berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Padang Lawas
- Sebelah Selatan : Kabupaten Mandailing Natal
- Sebelah Timur : Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia dan Mandailing Natal

Dari sudut aksebilitas terdapat beberapa alternatif jalur darat untuk menuju ke Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain adalah:

- Jalan Negara dan Provinsi dari Kota Medan melaui jalur Medan- Pematang Siantar – Balige – Sipirok – atau dapat juga melalui Sibolga sampai ke Padangsidimpuan.
- Dari Kota Bukit Tinggi dapat melalui jalur Bukit Tinggi – Mandailing Natal – Padangsidimpuan – sipirok.
- Dari Kota Pekanbaru melalui Pekanbaru – Dumai/Duri – Padangsidimpuan.

Tabel 1.1.1. Daftar Jumlah Desa /Kelurahan se-Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN
1	Angkola Selatan	17
2	Angkola Barat	14
3	Muara Batang Toru	9
4	SD Hole	14

5	Sipirok	40
6	Arse	10
7	Angkola Sangkunur	10
8	Angkola Timur	14
9	Batang Toru	23
10	Batang Angkola	21
11	Tantom Angkola	17
12	Aek Bilah	12
13	Marancar	12
14	Sayur Matinggi	19
15	Angkola Muara Tais	15
	TOTAL	**248**

1.2. Luas Wilayah

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas wilayah sebesar ± 4. 253,41 Km² secara administratif menjadi terdiri menjadi 15 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dirinci berdasarkan luas kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.1. Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Berdasarkan Luas Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km²)
1	Angkola Selatan	Simarpinggan	225,31
2	Angkola Barat	Sitinjak	194,60
3	Muara Batang Toru	Huta Raja	273,13
4	SD Hole	Sipagimbar	474,13
5	Sipirok	Pasar Sipirok	557,26
6	Arse	Jonggol Julu	248,75
7	Angkola Sangkunur	Simataniari	295,00
8	Angkola Timur	Pargarutan	286,40
9	Batang Toru	Batang Toru	351,49
10	Batang Angkola	Pintu Padang	211,36
11	Tantom Angkola	Situmba	195,68
12	Aek Bilah	Biru	327,17
13	Marancar	Pasar Marancar	86,88
14	Sayur Matinggi	Sayur Matinggi	376,55
15	Angkola Muara Tais	Muara Tais	149,70
		TOTAL	**4.253,41**

BAB II
KEBIJAKAN

2.1. Visi dan Misi Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional

Visi

Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas

Misi

1. Mengarus utamakan pembangunan berwawasan penduduk
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan Keluarga
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

2.2. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Visi

Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Mandiri, Pembangun, Berkualitas dan Sejahtera

Misi

1. Meningkatkan pelayanan Alat Kontrasepsi (Alkon) kepada Pasangan USia Subur yang produktif dan potensial
2. Melakukan perencanaan keluarga secara cermat
3. Melakukan peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi
4. Melakukan pembinaan keterampilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga
5. Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Adapun tujuan Jangka Menengah Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas.

Sedangkan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontraasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmed need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

2.4. Landasan Hukum

Dasar hukum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nmor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabuapten Tapanuli Selatan.
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

3.1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

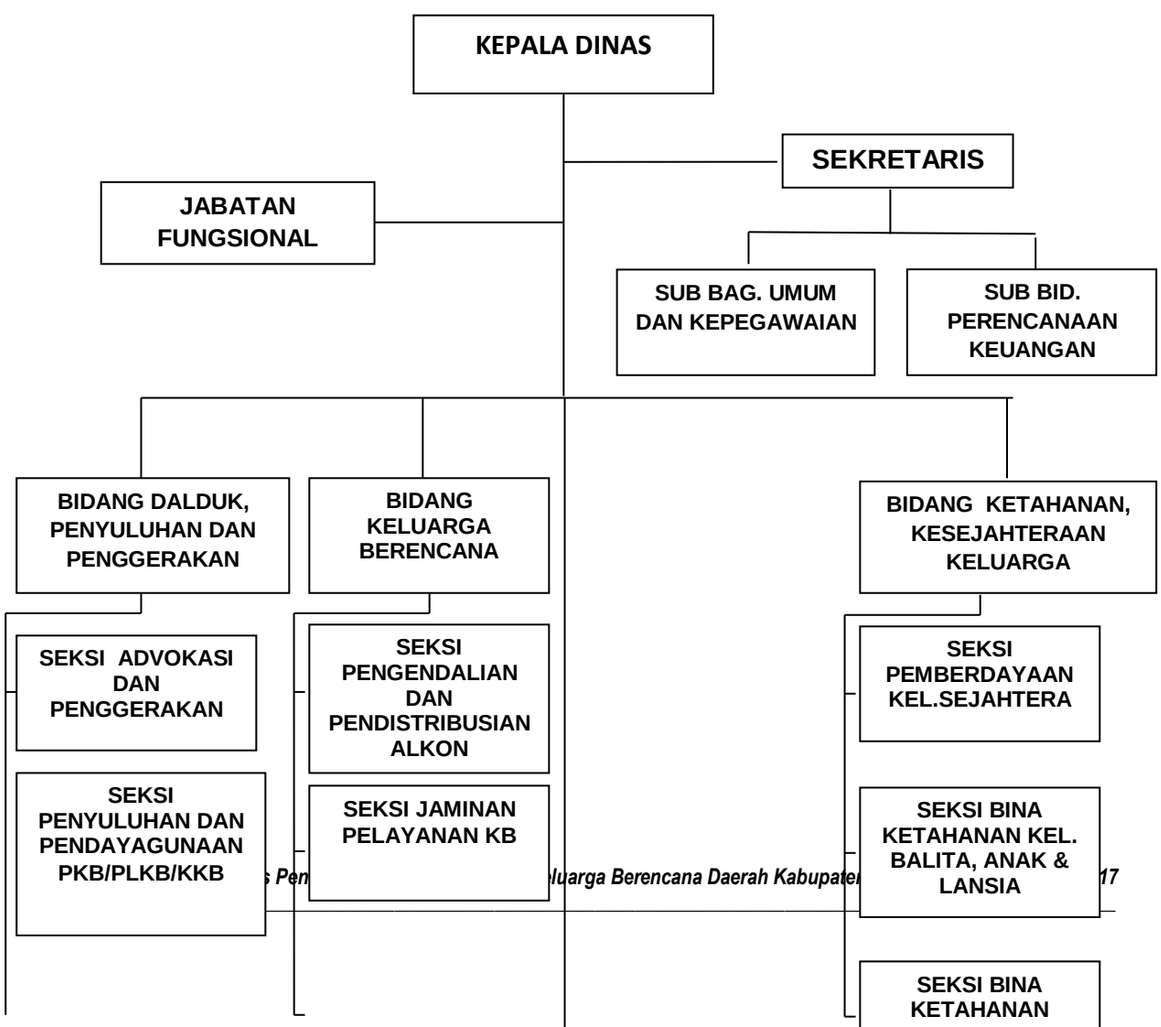

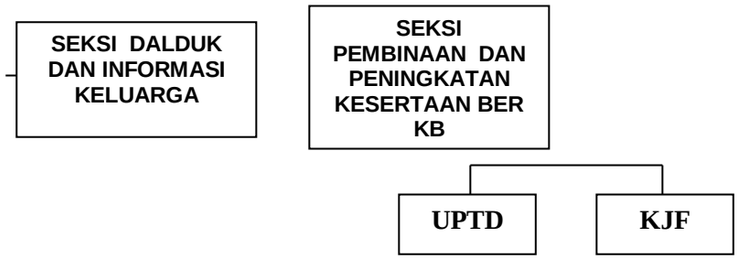
SEKSI DALDUK DAN INFORMASI KELUARGA
SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN BER KB
UPTD
KJF

Keterangan :

1. Kepala Dinas : AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
2. Sekretariat : TUTI AMRIANI, SKM, MKM
3. Sub.Bag.Umum dan kepegawaian : EVA KHOIRIYAH HARAHAP, SKM
4. Sub Bid. Perencanaan dan Keuangan : IKHSAN M.HSB, MM
5. Bid.Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan : ROYHAN AL AMIN SIREGAR, SP
6. Analis Kebijakan : SERIANNA, S.Sos, MKM
7. Penyuluh Kesmas : EFLINA M. PULUNGAN, S.Kep, Ns, MKM
8. Analis Kebijakan : PARLAUNGAN SIAGIAN, SH
9. Bidang Keluarga Berencana : MAWARNI, SKM
10. Analis Kebijakan : MASNAWATI, S.Tr.Keb, MKM
11. Penyuluh Kesmas : LELI SURIANI
12. Bid. Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga : Drs. RAHMAD SUHELMI SIREGAR
13. Analis Kebijakan : NURSALMAH HABIBAH, SKM
14. Analis Kebijakan : AHMAD KHAIRIL, SH, M.Kes

3.2. Bazzeting

Tabel 3.2.1. Daftar Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Pegawai	JUMLAH
1	PNS	38
2	CPNS	-
3	Honor Daerah	50
4	Honor Provinsi (PLKB)	-
5	Out scorching	-
Jumlah		**88**

Tabel 3.2.2. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S-2)	7
2	Sarjana (S-1)	20
3	Sarjana Muda / D3	9
4	D-1 / D-2	-
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-

7	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		**38**

Tabel 3.2.3. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	JUMLAH
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	32
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
Jumlah		**38**

Tabel 3.2.4. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Diklat	JUMLAH
1	ADUMLA / DIKLAT PIM IV	-
2	SPAMA / DIKLAT PIM III	1
3	SPAMEN / DIKLAT PIM II	1
Jumlah		**2**

Tabel 3.2.5. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
Jumlah		**14**

Tabel 3.2.6. Daftar Jumlah Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PPLKB)

No.	Kecamatan	JUMLAH
1	Batang Angkola	11
2	Sipirok	11
3	Saipar Dolok Hole	4
4	Angkola Timur	6
5	Angkola Barat	10
6	Angkola Selatan	11
7	Marancar	5
8	Batang Toru	9
9	Sayur Matinggi	6
10	Arse	4
11	Muara Batang Toru	4
12	Aek Bilah	3
13	Angkola Sangkunur	7
14	Tantom Angkola	6
Jumlah		**97**

Tabel 3.2.7. Daftar Jumlah Sumber Daya Aset/Modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Gedung Tempat Kerja	16 Unit
2	Kenderaan Roda 4	6 Unit
3	Kenderaan Roda 2	31 Unit
4	Meja	57 Buah
5	Kursi	100 Buah
6	Laptop	12 Unit

7	Personal Computer (PC)	7 Unit
8	Proyektor	7 Unit
9	Telephon Mobil (Smartphon)	14 Unit
Jumlah		**259**

3.3.Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN RI Nomor 163 Tahun 2016 dengan uraian tugas pokok dan fungsi.

Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.
- Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- Pelaksanaan pelayanan KB.
- Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

I. Kepala Dinas

Nama : Ahmad Ibrahim Lubis, S.Sos, MM

Nip : 19740205 199602 1 003

Tugas

Membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kesekretariatan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

- Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam tugasnya;
- Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
- Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
- Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Dinas;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretariat

Nama : Tuti Amriani, SKM, MKM
Nip : 19741229 200604 2 008

Tugas

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Fungsi

- Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Penyusunan rencana program dan anggaran
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat
- Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Nama : Ikhsan M Hasibuan, MM
Nip : 19750617 200701 1 005

Tugas dan Fungsi

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nama : Eva Khoiriyah Harahap, SKM
Nip : 19900223 201504 2 001

Tugas dan Fungsi

Melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

III. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Nama : Royhan Al Amin Siregar, SP

Nip : 19840413 201101 1 010

Tugas

Melaksakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten dan kota.

Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota
- Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya

a) Analis Kebijakan

Nama : Serianna, S.Sos, MKM
Nip : 19710822 199703 2 002

Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi analis kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analis kebijakan.

b) Penyuluhan Kesmas

Nama : Eflina M. Pulungan, S.Kep, Ns, MKM

Nip : 19820429 200903 2 009

Tugas dan Fungsi

Melakukan edukasi mengenai kesehatan pada perorangan, kelompok dan masyarakat di suatu wilayah.

c) Analis Kebijakan

Nama : Parlaungan Siagian, SH

Nip : 19690102 199003 1 002

Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi analis kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analis kebijakan.

IV. Bidang Keluarga Berencana

Nama : Mawarni, SKM

Nip : 19661016 198803 2 007

Tugas

Melaksakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana.

Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana
- Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana
- Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana
- Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota
- Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota
- Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana
- Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana
- Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya

a) Analis Kebijakan

Nama : Masnawati, S.Tr.Keb, MKM
Nip : 19800605 200801 2 006

Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi analis kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analis kebijakan.

b) Penyuluh Kesmas

Nama : Leli Suriani
Nip : 19790818 200012 2 002

Tugas dan Fungsi

Melakukan edukasi mengenai kesehatan pada perorangan, kelompok dan masyarakat di suatu wilayah.

V. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Nama : Drs. Rahmad Suhelmi Siregar
Nip : 19701015 199103 1 006

Tugas

Melaksakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita.
d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan kerahanan remaja .
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan.
f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

a) Analis Kebijakan

Nama : Nursalmah Habibah, SKM
Nip : 19740514 200701 2 003

Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi analis kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analis kebijakan.

b) Analis Kebijakan

Nama : Ahmad Khairil, SH, M.Kes

Nip : 19750321 200604 1 006

Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi analis kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analis kebijakan.

VI. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
HASIL KINERJA

Hasil kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah mewujudkan prioritas kelima dari Agenda Prioritas Pembangunan NAWACITA yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang dapat diukur dari RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah).

Dimana RPJM ini bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program, sekaligus untuk memotret hasil kinerja oleh pelaksana program yang merupakan gambaran out come Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga seluruh sasaran dan indicator kinerja diarahkan untuk mendukung Agenda Prioritas Pembangunan.

Tabel 4.1 Indikator Capaian Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	Meningkatkan pelayanan alat kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur yang produktif dan potensial	Rata-rata jumlah anak per-keluarga	2,37	2,35
2	Melakukan perencanaan keluarga secara cermat	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,55	2,54
3	Melakukan peningkatan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi	Persentase pemakaian kontrasepsi (Modern Contraseptive Prevalence Rate/ CPR)	22,756	37,498
4	Melakukan pembinaan keluarga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmed need) (%)	12,67	12,61
5	Melaksanakan pembinaan keterampilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Persentase KB aktif (PA) MKJP	57,42	36,45
6	Meningkatkan pembangunan berwawasan kependudukan	Tingkat putus pakai kontrasepsi	58,24	58,36

Tabel 4.2 Indikator Capaian Sasaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	Keluarga Berencana	Terlaksananya pelayanan KB kepada PUS yang produktif dan potensial	70%	70%
2	Pelayanan Kontrasepsi	Terlaksananya pelayanan alat kontrasepsi kepada PUS yang produktif	15 Kec	15 Kec

		dan potensial		
3	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	15 Kec	15 Kec
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	33 Klmpk	33 Klmpk
5	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terlaksananya sosialisasi tentang penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	47 Klmpk	33 Klmpk
6	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Terlaksananya sosialisasi tentang pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu_PAUD	33 Klpk	33 Klpk

4.1. Dokumentasi Kegiatan Bidang Dalduk Penyuluhan dan Pergerakan

a. Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan dan Integrasi di Kampung KB Tahun 2022

b. Kegiatan Pembinaan BOKB Poktan Tahun 2023

4.2. Dokumentasi Kegiatan Bidang Keluarga Berencana

a. Kegiatan Pelayanan KB Gratis Dalam Rangka Momentum TNI-KKBPK-KESEHATAN Tahun 2023

b. Kegiatan Medis Operasi Wanita (MOW) Dalam Rangka Momentum KKBPK-KESEHATAN Tahun 2023

c. Kegiatan Pelayanan KB Gratis Dalam Rangka TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Tahun 2023

4.3. Dokumentasi Kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

a. Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Tahun 2023

b. Pemberian Transport Dalam Rangka Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting Tahun 2023

c. Kegiatan Pertemuan Internalisasi Pengasuhan Balita Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023

4.4 Kegiatan lainnya

a. Kegiatan Memeriahkan HUT RI Kabupaten Tapanuli Selatan

b. Kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan

c. Stand Pameran Dinas PPKB Dalam Acara HUT Kabupaten Tapanuli Selatan

d. Kegiatan Olahraga Dalam Berbagai Acara

Lampiran 1

GAMBAR BALAI PENYULUHAN KB SE-KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Batang Angkola

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Aek Bilah

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Saipar Dolok Hole

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Batang Toru

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Angkola Barat

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Arse

Balai Penyuluhan KB Angkola Selatan

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Angkola Sangkunur

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Angkola Timur

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tantom Angkola

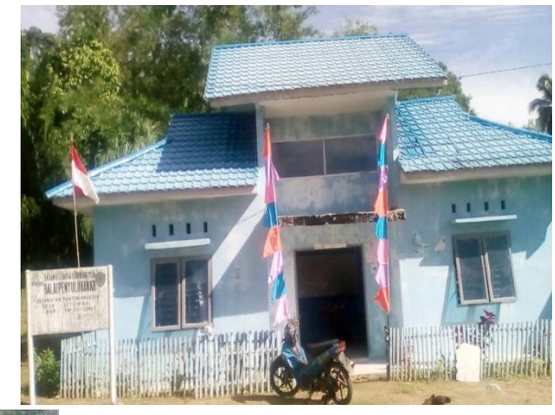

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Marancar

Balai Penyuluhan KB
Kecamatan Muara
Batang Toru

Balai Penyuluhan KB
Kecamatan Sayur Matinggi

Lampiran 2

GAMBAR TRANSPORTASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT PELAYANAN KB

BkkbN
ENDARAAN DISTRIBUSI ALOKON
SPPKB KABUPATEN BEKASI
Tahun 2016

BB 5162 KB
02 21

BB 5169 KB
02 16

S

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak banyak namun sangat dominan, dikarenakan pada tahun 2016 yang mengacu pada PP no 18 Tahun 2016 dimana dikatakan bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di tingkat Kabupaten / Kota.
   Oleh sebab itu, yang dulunya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi dua bagian yang terpisah yaitu (a)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (b)Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga terjadi pembagian kerja.

2. Dukungan dana anggaran APBD yang masih tergolong sangat terbatas dalam pelaksanaan program Dinas PPKB Daerah Kab. Tapanuli Selatan , sehingga kegiatan Program Kerja Keluarga Berencana masih jauh dari capaian maksimal.

3. Kurangnya petugas penyuluh dan petugas lapangan.

4. Pembinaan terhadap kader maupun terhadap akseptor sudah mulai berkurang dikarenakan kurangnya petugas penyuluh dan pembinaan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan tentang penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

6. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang program kerja Dinas PPKB Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk program kerja di Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.

7. Proses peralihan PPLKB/PLKB dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat membawa dampak yang positif terhadap daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana kinerja yang bersifat E-Visum sangat mendukung dalam memonitoring dan evaluasi kegiatan serta update informasi sehingga pengelolaan program KKBPK di tingkat Desa / Kelurahan dapat lebih maksimal.

1.2 Saran

1. APBD Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat menambah anggaran agar program kerja Dinas PPKB Daerah Kab. Tapanuli Selatan dapat ditingkatkan.

2. Pemerintah daerah diharapkan melakukan penambahan pegawai dalam formasi penyuluhan program Keluarga Berencana.

3. Adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalitas petugas dengan mengadakan pelatihan tekhnis dan menejerial baik yang dilaksanakan di tingkat Provinsi maupun Tingkat Pusat.

4. Mengupayakan peningkatan pengadaan dan penyempurnaan sarana dan prasarana operasional serta tekhnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.